



## **PENETAPAN SURAT PENGKAPAN OLEH ICC MENJADIKAN RUANG SEMPIT BAGI PUTIN MENGINJAKAN KAKI DI 123 NEGARA**

**Mass Achmad Rifqy, Adie Natanegara Hawadi, Moh Miftah ilmi polapa,  
Muhamad Rafli, Herli Antoni**

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email : [massachmadrifqy@gmail.com](mailto:massachmadrifqy@gmail.com)

Email : [herli.antoni@unpak.ac.id](mailto:herli.antoni@unpak.ac.id)

### **Abstrak**

Metode penelitian ini berfokus pada penerbitan surat dari ICC yang menyebabkan kesulitan bagi Putin untuk menginjakkan kaki di 123 negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan orang lain menemukan informasi tentang surat pernyataan ICC untuk Putin dan juga sebagai media pembelajaran bersama. Metode artikel ini disusun menggunakan metode resrarch hukum dengan pendekatan normatif yuridis yang mengacu pada peraturan hukum internasional. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data secon dary adalah studi literatur atau data literatur seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan surat dari ICC menyebabkan Putin kesulitan untuk pergi ke 123 negara. Penerapan undang-undang Statuta Roma 1998 terhadap dugaan pelanggaran hukum Putin, norma hukum yang berlaku untuk semua karena itu adalah prinsip kemanusiaan.

### **Abstract**

This research method focuses on the issuance of a letter from the ICC that causes difficulties for Putin to step foot in 123 countries. The purpose of this research is to make it easier for others to find information about the ICC statement letter for Putin and also as a shared learning medium. The method of this article is prepared using a legal resrarch method with a juridical normative approach that refers to international legal regulations. The data used in this article is secon dary data is a literature study or literature data such as books, journals, and related article. The results showed that release of the letter from the ICC caused Putin's difficulty to go to 123 countries. The application of the 1998 Rome Statute law to Putin's alleged violation of the law, a legal norm that applies to all because it is a humanitarian principle.

### **PENDAHULUAN**

Hukum kejahatan internasional merupakan gabungan antara hukum pidana dan hukum internasional. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum kejahatan internasional juga didasarkan pada kedua yurisdiksi tersebut. Hukum kejahatan internasional adalah seperangkat prinsip dan regulasi hukum tentang tindakan kejahatan internasional yang dilakukan oleh organisasi atau badan hukum agar tercapai tujuannya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dan aturan



hukum ini bersifat internasional, tidak bersifat nasional atau lokal. Asas dan kaidah kejahatan internasional sebenarnya terdapat dalam perjanjian internasional yang mengatur kejahatan internasional secara langsung ataupun tidak langsung.

Peradilan international memiliki international legal personality yang di dalam hukum international artinya bahwa status yang memungkinkan suatu entitas dianggap sebagai subjek hukum international tersendiri yang dapat memiliki hak dan sekaligus dibebani kewajiban berdasarkan norma hukum international.<sup>1</sup> Perkembangan pesat tentang masalah perang di dalam sejarah HI, terjadi pada abad 16 – 18 ketika penulis-penulis terkenal secara doktrinal mencari dasar hukum dari suatu peperangan. Di antaranya adalah Hugo Grotius, seorang ahli hukum Belanda yang telah menulis sebuah treatise, "De Jure belli ac pacis libri tres" (The Law of War and Peace in Three Books) pada tahun 1625. Di dalam bukunya itu, ditegaskan :

- ❖ Mereka yang melaksanakan perang untuk menang tetapi dengan niat tidak benar layak untuk dituntut;  
Mereka yang melaksanakan perang secara melawan hukum bertanggungjawab atas akibat-akibat yang terjadi yang sepatutnya diketahui; dan
- ❖ Sekalipun jenderal atau prajurit yang sesungguhnya dapat mencegah kejadian/kerugian sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.<sup>2</sup>

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah badan peradilan yang independen dan permanen. Mahkamah ini didirikan berdasarkan Statuta Roma, yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 1998 dalam sebuah konferensi di ibukota Italia. Kompetensinya meluas ke semua kejahatan internasional yang paling serius yang dilakukan setelah 1 Juli 2002, tanggal Statuta Roma mulai berlaku. Yurisdiksi pengadilan ini terbatas pada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, serta kejahatan agresi.

Selama 20 tahun pertama beroperasi, ICC telah mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus yang penting bagi keadilan internasional, menjelaskan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan tentara anak, penghancuran warisan budaya, kekerasan seksual, atau serangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah.<sup>3</sup> Adapun rumusan maslahnya sebagai berikut:

1. Apakah Alasan ICC Menetapkan Surat Penangkapan Vladimir Putin?
2. Apakah Puti Akan Di Tangkap Apabila Menginjakan Kaki Di 123 Negara?

---

<sup>1</sup> J.G Starke, Pengantar Hukum International II, (Jakarta:Sinar Grafika,1989), hlm 798

<sup>2</sup> Romli Atmasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm 3.

<sup>3</sup> *Russia: International Criminal Court issues arrest warrant for Putin* (Dalam bahasa inggris).17 Maret 2023



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Alasan ICC Menetapkan Surat Penangkapan Vladimir Putin

Dunia yang dihadapkan pada tantangan yang semakin besar terhadap sistem keamanan internasional pasca-1945 dan harapan demokratis pasca-1989, dunia di mana "kekuatan adalah yang benar" dan sinisme terus menang atas humanisme, surat penangkapan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan peristiwa yang sangat besar. Tidak adaandingannya sejak terbentuknya sistem peradilan internasional yang baru, 30 tahun yang lalu.

Putin adalah kepala negara keempat yang dinyatakan sebagai "buronan" ketika masih berkuasa, setelah Presiden Serbia Slobodan Milosevic, oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) pada tahun 1999, pemimpin Sudan Omar al-Bashir pada tahun 2009, dan pemimpin Libya Muammar Gaddafi pada tahun 2011 oleh ICC. Putin adalah kepala negara pertama dari negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), "P5", kekuatan nuklir dan penjamin keamanan internasional, yang dikategorikan sebagai penjahat perang, meskipun ia dianggap tidak bersalah sampai pengadilan dan vonis dijatuhkan.<sup>4</sup>

Sebuah 'langkah pertama' menuju keadilan Meskipun Rusia menolak surat perintah tersebut, Ukraina merayakan langkah tersebut. Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba menyatakan bahwa "roda keadilan telah berputar". Yang lain juga percaya bahwa tindakan ICC akan berdampak signifikan. "Pengadilan Pidana Internasional telah menyatakan Putin sebagai buronan, ini adalah langkah pertama untuk mengakhiri impunitas yang telah lama mengganggu perang Rusia di Ukraina," kata Balkees Jarrah, direktur hukum internasional di Human Rights Watch. "Keputusan itu mengirimkan pesan yang jelas bahwa melakukan atau membiarkan kejahatan serius terhadap warga sipil dapat menyebabkan hukuman penjara di Den Haag," katanya.

Beberapa negara terus bereaksi setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dari China ke Rusia. Jerman telah mengkonfirmasi akan menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin jika dia memasuki wilayah Jerman. Statuta Roma 1998 mencantumkan empat jenis kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional: Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Putin dinyatakan bersalah atas kejahatan perang. Salah satu komponen kejahatan perang Statuta Roma adalah deportasi paksa dan pemindahan ilegal orang-orang dan orang-orang di bawah usia 18 tahun.

Karim Khan, kepala jaksa di Pengadilan Kriminal Internasional, dengan tegas mengatakan: "Putin, sebagai presiden Rusia, melakukan deportasi paksa terhadap anak di bawah umur, dan itu adalah kejahatan serius." Rusia bereaksi dengan penghinaan terhadap surat pengadilan tersebut. Wakil Presiden Dewan Keamanan Rusia Medvedev, sekutu politik Putin yang setia, segera menanggapi dengan mengatakan bahwa surat perintah itu hanyalah kertas toilet. Presiden Putin tidak

---

<sup>4</sup> *War in Ukraine: International justice makes Putin an outcast* (dalam bahasa inggris). 22 Maret 2023



dapat ditangkap atas perintah ICC saja karena Rusia bukan merupakan pihak Statuta Roma 1998 atau tidak pernah meratifikasinya, sehingga Rusia tidak terikat. Wakil Ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev mengatakan "Mereka memutuskan untuk mengadili presiden, dari kekuatan nuklir yang bukan pihak ICC karena alasan yang sama seperti AS dan beberapa negara lain. Jelas bahwa arahan itu adalah yang paling keras,".

Menurutnya, hal itu akan berdampak terhadap timbulnya konsekuensi bencana bagi hukum internasional, yang berarti akan runtuhnya pondasi, prinsip-prinsip hukum, termasuk hukuman yang tidak terhindarkan. "Tetapi konsekuensi hukum internasional akan menjadi bencana. Ini berarti runtuhnya pondasi, prinsip-prinsip hukum, termasuk dalil hukuman yang tak terhindarkan. Tidak seorangpun sekarang akan beralih menjadi ke lembaga internasional," lanjutnya. Dia mengatakan bahwa kemunduran hubungan internasional akan terjadi dan kepercayaan antar negara akan habis.

Penerapan hukum Statuta Roma tahun 1998 terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Putin mengikuti prinsip *erga omnes*, norma hukum yang berlaku untuk semua karena merupakan prinsip kemanusiaan. Orang atau pihak yang melakukan pelanggaran di bidang kemanusiaan mengikuti prinsip universal. Tidak boleh ada orang atau pihak yang menyerang dan mengejutkan kemanusiaan dan hati nurani. Mereka yang diperbolehkan pergi dengan bebas hanya karena mereka bukan pihak dari instrumen hukum. Preseden hukum yang dapat kita gunakan dalam kasus ini adalah putusan Mahkamah Internasional tahun 1986 di Nicaragua terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat membela diri dengan menyatakan bahwa Nikaragua tidak memiliki kedudukan di pengadilan karena tidak pernah meratifikasi piagam pengadilan. Pengadilan menuduh Amerika Serikat menggunakan kekerasan di wilayah Nikaragua. Pengadilan dengan tegas mengatakan: "Meskipun pengadilan internasional tidak dapat menilai berdasarkan perjanjian internasional, ia dapat menilai berdasarkan praktik internasional."

Jenderal Kroasia Slobodan Praljak dihukum sebagai penjahat perang atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Perang Kroasia-Bosnia. Namun, dalam persidangan ICTY pada 2017 lalu, Slobodan meminum racun dan meninggal dunia. Kasus berikut adalah mantan presiden Federasi Yugoslavia Slobodan Milosevic, yang dituduh oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia pada tahun 1999 atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama Perang Kosovo. Selama persidangan kasus tersebut, dia meninggal karena serangan jantung dalam tahanan Mahkamah Internasional.

Dalam kasus yang lebih klasik, Jenderal Yamashita, seorang ahli militer Jepang selama Perang Dunia Kedua (WW), diadili oleh pengadilan khusus setelah perang. Dia dihukum karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat dan tentara negara-negara Asia Timur yang diduduki Jepang. Dia digantung. Kami juga terkejut dengan pengadilan Israel yang mengadili Adolf Eichmann, seorang kolonel tentara Nazi selama Perang Dunia II. Dia diculik oleh



agen rahasia Israel di Argentina dan kemudian dibawa ke Israel. Dia bertanggung jawab atas pembantaian keturunan Yahudi dengan membunuh mereka di kamar gas dan racun. Pengadilan Israel dapat membuktikan bahwa Eichman adalah penjahat perang dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama Perang Dunia II. Dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1961.

Fakta ini dengan jelas menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh bebas dari hukum ketika mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Cepat atau lambat mereka semua berakhir di pengadilan dan ditantang oleh pengadilan. Jaksa Agung Pengadilan Kriminal Internasional yang menangani kasus Putin dengan tegas mengatakan: "Jika Anda pikir Anda bisa melakukan kejahatan di siang hari dan tidur nyenyak di malam hari, mungkin Anda harus melihat kembali sejarah." Sejarah Pembelaan Hukum. Fakta ini dengan jelas menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh bebas dari hukum ketika mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Cepat atau lambat mereka semua berakhir di pengadilan dan ditantang oleh pengadilan.

### **Puti Akan Di Tangkap Apabila Menginjakan Kaki Di 123 Negara**

Pada hari Kamis, penyelidikan yang didukung oleh PBB menyatakan bahwa serangan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina, termasuk tindakan penyiksaan dan pembunuhan yang sistematis di wilayah pendudukan, merupakan salah satu permasalahan potensial yang merupakan kejahatan perang dan mungkin juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil investigasi yang mendalam juga mengungkap adanya kejahatan terhadap orang Ukraina di tanah Rusia, termasuk anak-anak Ukraina yang dideportasi dan terpisah dari keluarga mereka, sistem "penyaringan" untuk memilih orang Ukraina yang harus dideportasi, serta kondisi penahanan dan penyiksaan yang sangat kasar dan tidak manusiawi. Tindakan yang sangat tidak biasa dari seorang anggota Dewan Keamanan PBB.

123 negara yang menjadi anggota ICC memiliki kewajiban hukum untuk menangkap Putin jika ia memasuki wilayah mereka. Ada kemungkinan bahwa Putin akan ditangkap karena terlibat dalam kudeta yang dilakukan oleh elit Rusia atau bahkan oleh masyarakat sipil. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin ditetapkan sebagai buronan global, sudah satu minggu berlalu. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin pada 17 Maret lalu karena ia diduga melakukan kejahatan perang dalam invasi Ukraina. Beberapa negara anggota ICC masih mempertimbangkan untuk menahan dan menyerahkan Putin ke pengadilan di Den Haag. Tidak jelas apakah Putin akan diadili atas deportasi ilegal anak-anak Ukraina. Namun, jika ia memasuki wilayah negara anggota ICC, mereka harus menjalankan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Maria Lvova-Belova, komisioner presiden Rusia untuk hak-hak anak.

Putin juga berisiko dipermalukan, dipermalukan, atau dibunuh oleh musuh-musuhnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Semua negara anggota ICC, termasuk Uni Eropa, sebagian besar negara Afrika, semua negara Amerika Latin dan Amerika Selatan kecuali Kuba dan Nikaragua, dan bahkan Tajikistan, harus



menangkap Putin jika ia menginjakkan kaki di wilayah mereka. ICC tidak memiliki kepolisian sendiri untuk menegakkan surat perintah penangkapan, sehingga bergantung pada negara anggota untuk membantu menempatkan individu di bawah penangkapan oleh penegak hukum nasional, yang tidak selalu berhasil di masa lalu, seperti yang terjadi pada mantan pemimpin Sudan, Omar al-Bashir, yang masih buron meskipun ICC telah mengeluarkan dua surat perintah penangkapan terhadapnya pada tahun 2009 dan 2010 dan ia telah mengunjungi negara anggota ICC sejak saat itu.

Dalam asas hukum internasional, dalilnya adalah *pacta sunt servanda*, semua pihak yang menandatangani suatu perikatan harus tunduk padanya. Prinsip ini diterapkan sebagai prinsip umum. Satu hal yang dilupakan oleh mereka yang percaya bahwa Putin tidak dapat disentuh oleh pengadilan internasional hanya karena Rusia tidak menandatangani Statuta Roma 1998 adalah bahwa Ukraina, musuh Rusia, menjadi korban kebrutalan Putin, sebuah partai Roma dari tahun 1998 adalah . undang-undang Ukraina telah meratifikasi perjanjian ini. Oleh karena itu, semua kejahatan Rusia dari 24 Februari 2022 hingga saat ini, yang terjadi di dalam yurisdiksi Ukraina, salah satu pihak dalam Konvensi Statuta Roma 1998, harus tetap dikaitkan dengan Rusia. Karena kejahatan dan pelanggaran terjadi di wilayah Ukraina yang menjadi satu pihak, instrumen hukum Statuta Roma tahun 1998 dipaksa untuk melindungi pihak Ukraina. Bentuk perlindungannya adalah menghukum pihak-pihak yang melanggar semua hak Ukraina berdasarkan Statuta Roma 1998.

Vladimir Vladimirovich Putin, Presiden Federasi Rusia, diduga bertanggung jawab atas tindakan kejahatan perang seperti pengusiran penduduk (terutama anak-anak) secara tidak sah dan pemindahan penduduk (terutama anak-anak) secara tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia (sesuai dengan pasal 8(2)(a)(vii) dan 8(2)(b)(viii) Statuta Roma). Tindakan-tindakan tersebut diduga terjadi di wilayah yang diduduki Ukraina sejak 24 Februari 2022. Ada alasan yang masuk akal untuk menganggap Putin bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan tersebut, (i) karena ia melakukan tindakan-tindakan tersebut secara langsung, bersama-sama dengan orang lain dan/atau melalui orang lain (sesuai dengan pasal 25(3)(a) Statuta Roma), dan (ii) karena ia gagal mengontrol dengan baik para bawahannya baik sipil maupun militer yang melakukan tindakan-tindakan tersebut atau mengizinkan tindakan-tindakan tersebut terjadi, dan berada di bawah otoritas dan kontrolnya secara efektif, sesuai dengan tanggung jawab atasannya (sesuai dengan pasal 28(b) Statuta Roma).<sup>5</sup>

### KESIMPULAN

Penerapan hukum Statuta Roma tahun 1998 terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Putin mengikuti prinsip *erga omnes*, norma hukum yang berlaku untuk semua karena merupakan prinsip kemanusiaan. Orang atau pihak yang melakukan

---

<sup>5</sup> Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova (dalam bahasa inggris). 17 Maret 2023



pelanggaran di bidang kemanusiaan mengikuti prinsip universal. Tidak boleh ada orang atau pihak yang menyerang dan mengejutkan kemanusiaan dan hati nurani. Mereka yang diperbolehkan pergi dengan bebas hanya karena mereka bukan pihak dari instrumen hukum. Preseden hukum yang dapat kita gunakan dalam kasus ini adalah putusan Mahkamah Internasional tahun 1986 di Nicaragua terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat membela diri dengan menyatakan bahwa Nikaragua tidak memiliki kedudukan di pengadilan karena tidak pernah meratifikasi piagam pengadilan. Pengadilan menuduh Amerika Serikat menggunakan kekerasan di wilayah Nikaragua. Pengadilan dengan tegas mengatakan: "Meskipun pengadilan internasional tidak dapat menilai berdasarkan perjanjian internasional, ia dapat menilai berdasarkan praktik internasional."

Statuta Roma 1998 mencantumkan empat jenis kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional: Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Putin dinyatakan bersalah atas kejahatan perang. Salah satu komponen kejahatan perang Statuta Roma adalah deportasi paksa dan pemindahan ilegal orang-orang dan orang-orang di bawah usia 18 tahun. Dalam asas hukum internasional, dalilnya adalah *pacta sunt servanda*, semua pihak yang menandatangani suatu perikatan harus tunduk padanya. Prinsip ini diterapkan sebagai prinsip umum. Satu hal yang dilupakan oleh mereka yang percaya bahwa Putin tidak dapat disentuh oleh pengadilan internasional hanya karena Rusia tidak menandatangani Statuta Roma 1998 adalah bahwa Ukraina, musuh Rusia, menjadi korban kebrutalan Putin, sebuah partai Roma dari tahun 1998 adalah undang-undang Ukraina telah meratifikasi perjanjian ini. Oleh karena itu, semua kekejaman Rusia dari 24 Februari 2022 hingga saat ini, yang terjadi di dalam yurisdiksi Ukraina, salah satu pihak dalam Konvensi Statuta Roma 1998, harus tetap dikaitkan dengan Rusia. Karena kekejaman dan pelanggaran terjadi di wilayah Ukraina yang menjadi satu pihak, instrumen hukum Statuta Roma tahun 1998 dipaksa untuk melindungi pihak Ukraina. Bentuk perlindungannya adalah menghukum pihak-pihak yang melanggar semua hak Ukraina berdasarkan Statuta Roma 1998.

Berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan atau territorial jurisdiction (*rationae loci*), maka ICC dapat mengadili kasus-kasus yang diserahkan oleh negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya kejahatan internasional. Termasuk dalam pengertian ini adalah negara dimana kapal atau pesawat didaftarkan jika kejahatan dilakukan di atas kapal atau pesawat negara peserta. Di samping itu yurisdiksi ICC juga berlaku dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi *ad hoc*.<sup>6</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa perilaku yang telah dilakukan oleh Putin sebagai Presiden Rusia atas kejahatan perang yang sedang berlangsung di Ukraina yang mana Ukraina adalah negara yang mengikuti Yuridiksi ICC dimana telah diatur dalam pasal Statuta Roma pasal 8(2)(a)(vii) dan

---

<sup>6</sup> JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998.14 APRIL 2007: 314 - 332



8(2)(b)(viii) Statuta Roma). Tindakan tersebut diduga terjadi di wilayah yang diduduki Ukraina sejak 24 Februari 2022. Ada alasan yang masuk akal untuk menganggap Putin bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan tersebut, (i) karena ia melakukan tindakan-tindakan tersebut secara langsung, bersama-sama dengan orang lain dan/atau melalui orang lain (sesuai dengan pasal 25(3)(a) Statuta Roma), dan (ii) karena ia gagal mengontrol dengan baik para bawahannya, maka Putin dapat dinyatakan melakukan suatu kejahatan Perang dan dapat diadili apabila menginjak di 123 negara anggota dan atau Pemerintahan Rusia sendiri yang menyerahkan Putin kepada ICC untuk dapat diadili di Pengadilan Mahkamah Internasional atas kejahatan yang dilakukannya, sehingga Ukraina mendapatkan keadilan atas keikutsertaan negaranya terhadap Yuridiksi ICC.

### DAFTAR PUSAKA

#### A. BUKU-BUKU

- J.G Starke, Pengantar Hukum International II, (Jakarta:Sinar Grafika,1989)  
Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, (Refika ditama, Bandung, 2000)

#### B. JURNAL

- Russia: International Criminal Court issues arrest warrant for Putin (Dalam bahasa inggris).17 Maret 2023  
War in Ukraine: International justice makes Putin an outcast. Lemonde.fr (dalam bahasa inggris). 22 Maret 2023  
Sefriani. Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. (2007).  
Diakses pada 7 April 2023 dari JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 14 APRIL 2007: 314 - 332.  
Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova. International criminal court (dalam bahasa inggris. 17 Maret 2023